

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, demokrasi sendiri merupakan bentuk dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, seperti pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara menjadi (eksekutif, legislatif, yudikatif), lembaga yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan adalah lembaga eksekutif (Presiden dan Menteri), sementara lembaga yang berwenang dalam hal pengadilan adalah yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), serta lembaga yang mewakili rakyat adalah legislatif (MPR, DPR dan DPD). Pemilihan Presiden atau Kepala Negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan presiden, begitupun lembaga legislatif, lembaga yang diperuntukkan menyampaikan aspirasi rakyat ini dipilih melalui pemilihan umum legislatif atau yang biasa disebut dengan Pesta Demokrasi.

Pemilu sendiri merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Adapun pengertian pemilu menurut ahli “Pada Hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia

¹ Undang-Undang no 8 tahun 2012 pasal 1 ayat 1

bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktab dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian Pemilu menurut Ali Moertopo adalah suatu lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pemilihan legislatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mana menjadi peraturan untuk di selenggarakannya pemilu tersebut.

Berbicara mengenai pemilu, tentu saja ada partai politik yang ikut serta meramaikan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden maupun pemilihan umum legislatif, di karenakan partai politik menjadi salah satu alat untuk menuju panggung kekuasaan dalam tatanan sistem pemerintahan Demokrasi, seperti yang disebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 angka 26 yang berbunyi “ Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Para kader yang di unggulkan masing-masing partai menjadi poros utama bagi partai politik untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai macam cara mereka lakukan untuk memenangkan kader yang diusungnya, demi menjaga eksistensi serta kebesaran nama partai.

Dibalik kesuksesan partai politik ketika memenangkan pemilu, ternyata ada banyak bantuan dari pihak luar partai politik seperti ORMAS. Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan sendiri merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²

Dengan peranan ORMAS yang mampu menyentuh masyarakat luas ORMAS sering di jadikan sebagai salah satu pendukung kuat PARPOL demi melancarkan tujuan mereka yaitu memenangkan pemilu. Namun dalam UU ORMAS nomor 17 tahun 2013 pasal 59 point b yang berbunyi “ORMAS dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik”. Ini berarti ORMAS tidak diperbolehkan mendukung pendanaan salah satu partai politik, jika mereka mendukung salah satu parpol otomatis mereka memberikan dana maupun tenaga serta gagasan mereka untuk suatu parpol tersebut, jika ini terjadi maka peraturan tersebut telah dilanggar. Namun pada kenyataannya masih banyak ORMAS yang menjadi sayap partai politik saat pemilu diselenggarakan, sebagai contoh Pemuda Pancasila yang mendukung partai golkar dalam ajang pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten Indramayu.

Seperti yang dilansir Radar Indramayu pada tanggal 4 januari 2014 “Totalitas kader Pemuda Pancasila akan menjadi faktor penentu memenangkan Daniel Muttaqien Syafiuddin (Ketua Pemuda Pancasila Cabang Indramayu) yang mencalonkan diri menjadi dengan konsolidasi ini diharapkan kader PP mampu membangun pola penggalangan konstituen khususnya dari segmen pemilih pemula dan pemuda” (Yoga Rahardiansya, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Indramayu). Apalagi sebelumnya, totalitas

² Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pasal 1 ayat 1

kader PP dalam memenangkan DMS juga nampak dari strategi membangun kemitraan dengan sejumlah komponen, melaksanakan event sosial kemasyarakatan, untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sebelumnya, Pemuda Parean Kandanghaur bertekad memenangkan Partai Golkar beserta tiga kader terbaiknya, untuk duduk dikursi parlemen pada pelaksanaan Pemilu yang akan dihelat 9 April 2014 mendatang, Kamis (2/1).³ Ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan DMS di dalam website pemuda Pancasila Indramayu yang berbunyi “ Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu, Daniel Muttaqien menyatakan, organisasi PP Indramayu harus bersikap netral dan tidak diperbolehkan memihak terhadap salah satu kandidat yang mengikuti pemilu legislatif 9 april 2014 nanti”.⁴

Mengapa PP bisa dijadikan partner dalam mendukung kesuksesan pemenangan calon dari partai Golkar?. Mengingat bahwa Kota Indramayu menjadi salah satu diantara beberapa kota yang dikuasai oleh Partai Golkar, oleh karena itu Pemuda Pancasila menjadi salah satu partner terbesar dari partai tersebut, mengingat Ketua dan mantan ketua PP sendiri adalah pengurus partai golkar, juga demi mempertahankan eksistensi serta dapat dengan mudah menjalankan tujuan dari organisasi. Sebenarnya peran ORMAS dalam masyarakat sangat berperan penting seperti, serikat buruh, ormas keagamaan seperti FPI dan lain sebagainya. Dengan peran ORMAS yang sangat lebih mudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat itu kenapa ormas begitu di

³ Dikutip dari : <https://hu-radar-indramayu.blogspot.co.id/> diakses tanggal 05 januari 2016 pada pukul : 20.00 WIB

⁴ Dikutip dari : <https://www.pikiran-rakyat.com/politik/2014/03/16/273990/pemuda-pancasila-harus-bersikap-netral> Diakses tanggal 05 januari 2016 pada pukul : 20.15 WIB

cari dan di nanti kehadirannya oleh partai politik saat pemilu tiba. Namun sudah banyak ORMAS yang menjadikan dirinya sebagai partai politik, untuk baru-baru ini ORMAS yang menjadi partai politik adalah NASDEM. Pada awal pembentukannya NASDEM berdiri sebagai ORMAS yang di komandoi oleh Surya Paloh, namun pada 26 juli 2011 NASDEM berubah haluan menjadi partai politik, NASDEM ini hanya sebagai contoh salah satu ORMAS yang akhirnya berubah haluan menjadi partai politik. Akankah Pemuda Pancasila juga merubah haluannya menjadi partai politik? Saya pikir tidak mengingat Pemuda Pancasila bisa dikatakan sebagai salah satu ORMAS peninggalan rezim Alm. Soeharto.

Pemuda Pancasila didirikan pada 28 oktober 1959 oleh Jendral Abdul Haris Nasution dan sejak tahun 1983 dipimpin oleh Japto Soerjono Soemarno. Dikutip dari wikipedia, organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi (preman) yang mendukung kediktatoran militer Soeharto , itu kenapa saya bisa mengatakan kalau ormas ini peninggalan rezim Soeharto. Kembali pada permasalahan pemuda pancasila di Indramayu yang mendukung partai golkar. Dalam AD/ART Pemuda Pancasila pada pasal 6 tertulis “Status Organisasi Pemuda Pancasila adalah independen”. Jika memang benar Pemuda Pancasila ini Independen lalu mengapa mereka mendukung partai golkar? Apa karena para kader mereka adalah anggota dari partai tersebut?. Jika mereka telah merapatkan sayapnya kepada Partai Golkar (Khususnya Pemuda Pancasila di Indramayu) ini berarti mereka sudah melanggar AD/ART yang mereka buat sendiri.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan salah satu ORMAS yaitu Pemuda Pancasila yang berada di Kabupaten Indramayu dalam keterkaitannya pada pemilu legislatif 2014 kemarin. Penulis ingin mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peran Pemuda Pancasila Dalam Pemenangan Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Indramayu”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pola relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dan Partai Golkar di kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana peran Pemuda Pancasila dalam kemenangan caleg Partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa pola relasi yang terjalin antara Pemuda Pancasila dan Partai Golkar di Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana peran pemuda pancasila dalam kemenangan caleg Partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten Indramayu.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis terhadap peranan ORMAS yang seharusnya dilarang mendukung partai dalam pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Isipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1. Memberikan informasi dan saran tentang Peran ORMAS Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Indramayu.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi.
3. Bagi peneliti dan pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang organisasi masyarakat khususnya tentang larangan ormas yang telah mendukung salah satu partai terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

D. Kerangka Dasar Teori

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Pemilihan Umum menurut Sigmund Neumann adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Profesor Maisel dan Buckley menjelaskan pengertian pemilu “ *elections are used to ensure popular support and legitimacy for those who make governmental decisions* ” Pemilihan umum adalah untuk memastikan dukungan maksimal dan legitimasi untuk para pembuat kebijakan di pemerintahan.⁶

Dari beberapa definisi pemilihan Umum diatas dapat menjelaskan bahwa Pemilu merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara Demokrasi untuk memilih siapa yang duduk di kursi pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur, adil, serta rahasia.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1

⁶ L. Sandy Maisel and Mark D.Bewer. 2012. Parties and Elections in America: The Electoral Process SIXth Edition. Forbes Boulevard-Suite-Lanham-Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, chapter 1 hlm. 4.

Menurut Jimly Asshidiqqie, pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala tersebut di karenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut: ⁷

- a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
- b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah.
- c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya.
- d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewedahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

⁷ Dikutip dari :<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/7975/7534>
Diakses pada tanggal 10 Januari 2015, pada pukul : 10.30 WIB

Adapun asas dari Pemilu yang disebutkan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 yaitu :

- a. Langsung, Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
- b. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
- c. Bebas, Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan

- e. Jujur Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tujuan dari pemilu itu sendiri adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945. Serta manfaat dari pemilu itu sendiri adalah :

- a. Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat ini tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- b. Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-

wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

- c. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
- d. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
- e. Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat.

Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Di dalam Literatur ilmu politik dikenal macam-macam sistem pemilihan umum. Dari sekian banyak macamnya itu pada umumnya dikenal dan berkisar dengan sistem distrik dan sistem proporsional.

Sistem Distrik merupakan Sistem menurut Historisnya yang tertua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang disebut distrik. Untuk keperluan pemilihan wilayah suatu negara dibagi dalam banyak distrik, dan jumlah wakil rakyat sesuai dengan jumlah distrik. Calon yang mendapat suara terbanyak dalam suatu distrik itulah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Setiap sistem mempunyai kelemahan dan kekuahannya. Sistem distrik mempunyai beberapa kelemahan karena sistem ini kurang memperhatikan keberadaan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi golongan-golongan ini terpecah-pecah dalam beberapa distrik. Di samping itu, sistem distrik juga representatif dalam arti bahwa calon yang kalah suara dalam satu distrik kehilangan suara-suara yang mendukungnya. Namun dalam sistem distrik wakil yang terpilih dapat lebih dikenal oleh daerah yang bersangkutan sehingga

hubungan dengan penduduk menjadi lebih erat. Hal ini bisa terjadi karena kecilnya daerah distrik.

Sistem perwakilan proporsional atau berimbang diadakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dalam sistem distrik. Dalam sistem berimbang jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik sesuai dengan jumlah yang didapatnya. Untuk mendapatkan jumlah kursi yang diperolehnya ditentukan suatu perbandingan, misalnya 1:300.000 yang artinya 300.000 pemilih mempunyai seorang wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem ini negara dianggap menjadi satu daerah pemilihan yang besar, tetapi untuk kepentingan teknis administratif negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang biasanya lebih besar dari daerah distrik dalam sistem distrik. Banyaknya wakil dalam setiap daerah pemilihan sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Jumlah wakil dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah dalam daerah pemilihan itu yang dibagi dengan angka perimbangan, misalnya 300.000 itu. Berdasarkan sistem ini setiap suara digitung artinya suara-suara lebih yang diperoleh suatu partai atau suatu golongan dalam suatu daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Di dalam praktik kenegaraan sistem pemilihan di suatu negara sering dikombinasikan dengan

situasi negaranya masing-masing. Dengan demikian tidak selalu murni seperti yang dijelaskan dalam teori pemilihan umum.⁸

2. Organisasi Masyarakat

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁹

Gramsci mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme “*privat*”, berbeda dengan negara, yang disebutnya sebagai masyarakat politik (*political society*). Secara konkret, Gramsci memaknai masyarakat sipil sebagai suatu wilayah institusi privat mencakup gereja, serikat-serikat dagang/pekerja, dan lembaga pendidikan, sementara negara adalah institusi-institusi publik seperti pemerintah, pengadilan, polisi dan tentara.¹⁰

Poempida Hidayatulloh mengungkapkan Ormas di Indonesia didirikan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kepentingan. Seperti misalnya kepentingan sosial dengan mengangkat isu-isu sosial dan usaha-usaha pembelaan terhadap kaum marginal, kepentingan ekonomi sebagai upaya mengangkat derajat kemakmuran dan kesejahteraan

⁸ Ensiklopedi Nasional Indonesia dalam Miftah Thoha, *BIROKRASI POLITIK & PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*, PRENAMEIA GROUP, Jakarta, 2014, hlm. 114-116.

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1

¹⁰ Otho H. Hadi, Desember 2010, *Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokrasi*, vol. 14, No. 2, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia.

kelompoknya, kepentingan politik sebagai upaya rekrutmen massa politik untuk kemudian disalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik tertentu yang mempunyai kesepahaman ideologi yang sama pada awalnya. Kemudian kepentingan religius yang merupakan upaya untuk memperkuat kelompok religi dalam melakukan pembinaan dan rekrutmen, selanjutnya kepentingan budaya yang fokus pada upaya konservasi kebudayaan, kepentingan profesi untuk peningkatan kualitas profesionalisme di bidang profesi tertentu, dan kepentingan networking atau lobi sebagai upaya perluasan jaringan (network) dalam rangka penguatan pengaruh yang bermanfaat untuk melobi kekuasaan.¹¹

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski Ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan Ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh Ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu untuk sifat kegiatan, Ormas tentunya harus dibedakan dengan Organisasi lainnya yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT, dll. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Adapun tujuan serta fungsi Ormas

¹¹ Fanny Yulia, FIGUR SURYA PALOH DAN PERSEPSI PENDUKUNG NASIONAL DEMOKRAT (Studi Deskriptif Tentang Persepsi Pendukung Organisasi Massa Nasional Demokrat Terhadap Surya Paloh Sebagai Figur Sentral Dalam Bingkai Komunikasi Politik), skripsi ilmu komunikasi universitas sumatera utara, 2010.

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Ormas Bertujuan Untuk

:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Ormas juga berfungsi sebagai sarana :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- c. Penyalur aspirasi masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemenuhan pelayanan sosial.

- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Posisi organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) pada setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) terasa sangat penting. Dengan sumber daya berupa pimpinan, kiai, anggota, dan amal usaha di berbagai bidang, ormas memiliki daya pikat luar biasa. Ormas juga memiliki jaringan organisasi yang mapan mulai pusat, wilayah, daerah, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Dalam menghadapi pesta demokrasi berupa pemilihan umum serentak di Tanah Air, ormas harus menjaga kehormatannya. Paling tidak ada empat alternatif yang bisa diambil pimpinan ormas dalam menghadapi pemilihan umum, yaitu:

- a. Pimpinan ormas bisa mengambil alternatif mendukung salah satu calon. Dengan sikap ini, berarti ormas akan berusaha memaksimalkan sumber dayanya untuk menyukseskan, bahkan mengampanyekan pasangan calon tertentu. Sikap ini jelas sangat berisiko karena bisa memicu perdebatan di internal organisasi.
- b. Pimpinan ormas bisa bersikap apatis, pasif, dan merasa masa bodoh dengan pilkada. Alternatif kedua ini sama ekstremnya dengan yang pertama. Jika alternatif pertama mendukung salah

satu calon, sikap kedua menunjukkan bahwa ormas tidak mau peduli dengan pemilu.

- c. Pimpinan ormas bisa bersikap ganda (dual position). Sikap ini mengharuskan pimpinan ormas mencitrakan diri sebagai organisasi yang tidak secara tegas mendukung atau menolak pasangan calon tertentu. Dalam posisi ini, ormas bisa turut “bermain” untuk memperoleh keuntungan dari beberapa pasangan calon. Tentu saja sikap dual position ini mengharuskan pimpinan ormas pintar bermain di atas panggung sandiwara.
- d. Pimpinan ormas bersikap kritis dan konstruktif. Posisi ini meniscayakan ormas bersikap kritis dan konstruktif pada semua partai politik dan pasangan calon. Dalam posisi ini, ormas harus melihat secara cermat kompetensi, integritas, dan rekam jejak semua pasangan calon. Selanjutnya, pimpinan ormas memberikan kriteria yang semestinya dimiliki pasangan calon dalam pilkada. Jika alternatif keempat ini yang diambil, posisi ormas pasti lebih elegan dalam menentukan sikap politik.¹²

Secara Umum, Ormas ini terbagi ke dalam 5 bentuk, yaitu :

- a. Organisasi Rakyat, seperti kelompok buruh atau kelompok petani.

¹² <https://nasional.sindonews.com/read/1065529/18/menjaga-marwah-ormas-dalam-pilkada-1448860876> di akses tanggal 24 februari 2016 pukul 11:04 WIB

- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- c. Organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dll.
- d. Organisasi massa, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dll.
- e. Organisasi berbasis komunitas, seperti serikat mukim, dll.

UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) membagi organisasi ke dalam dua bentuk, yaitu organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum. Organisasi berbadan hukum tersebut berupa (1) Yayasan dan (2) Perkumpulan. Sementara organisasi tidak berbadan hukum adalah organisasi yang proses pendiriannya tidak didasarkan kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM, namun teregistrasi di Notaris dan Kesbangpol dan Linmas masing-masing kabupaten/kota tempat organisasi tersebut terbentuk.

Helmut dan Salamon menyatakan terdapat beberapa bentuk Organisasi Masyarakat yang ada, antara lain:¹³

- a. *Network form*, yaitu Organisasi Masyarakat yang berbentuk jaringan-jaringan yang muncul ketika afiliasiafiliasi nasional dari International Non-Government Organization (INGO) meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam kegiatan kegiatan lintas negara, sekaligus membuka jaringan organisasi

¹³ Lester M.Salamon & Helmut K.Anheier, The Emerging Non-Profit Sector, Manchester: Manchester University Press, 1996.

yang mengangkat isu tertentu, seperti isu global warming, lingkungan, dst.

- b. *Special Form*, dimana Organisasi Masyarakat ini mempunyai bentuk khusus dan mempunyai agenda yang khusus pula, seperti bentuk Yayasan, lembaga donor, organisasi keuangan, organisasi pendidikan dan pelatihan, dll. Bentuk Organisasi Masyarakat ini berada diluar klasifikasi Organisasi Masyarakat konvensional lainnya, dan jumlah bentuk oms ini berkembang dari masa ke masa.
- c. *Dependent Bodies*, yaitu badan-badan atau organisasi-organisasi yang bergantung pada organisasi lain atau merupakan organisasi yang tergantung kepada organisasi induknya, seperti organisasi-organisasi Caritas Gereja.
- d. Lembaga non-konvensional yang terlibat dalam berbagai isi baik yang aktif maupun yang tidak aktif.

Peranan Organisasi kemasyarakatan terhadap kehidupan politik adalah :

- a. Peranan organisasi kemasyarakatan terhadap kehidupan politik di Indonesia dapat dibedakan atas sumbangannya kepada masyarakat dan pengabdianya kepada pemerintah tanpa perlu membedakan siapa yang berkuasa. Kepada masyarakat, pertama sekali organisasi kemasyarakatan membuka dirinya sebagai lembaga untuk melaksanakan sosialisasi politik.

- b. Organisasi masyarakat juga berperan sebagai penghimpun para individu pemangku kepentingan yang tersebar di seantero masyarakat untuk dipersatukan.
- c. Organisasi kemasyarakatan mengangkat kepentingan-kepentingan yang dihimpun tersebut ke dalam suatu formulasi kebijaksanaan.
- d. Melayani masyarakat sebagai sarana komunikasi politik.¹⁴

3. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Prof. Mariam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai “suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹⁶

¹⁴ Arbi Sanit, *SWADAYA POLITIK MASYARAKAT telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, Hal.58

¹⁵ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1

¹⁶ Dikutip dari: http://www.kompasiana.com/hatipikiranpenganpengan/analisis-fenomena-partai-politik-di-indonesia_550e4fc0813311ba2cbc628f

Sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya didalam pemilihan umum.¹⁷

Sigit Pamungkas mengatakan, dari definisi tersebut beberapa hal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Partai politik merupakan sebuah organisasi. Sebagai sebuah organisasi partai politik merupakan entitas yang bekerjanya didasari pada prinsip-prinsip tertentu seperti adanya kepemimpinan dan keanggotaan, devisionalisasi dan spesifikasi, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol serta adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi.
- b. Partai politik merupakan instrumen perjuangan nilai atau ideologi. Partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Nilai atau ideologi itu diyakini kebenarannya oleh kolektivitas individu yang tergabung dalam organisasi itu.
- c. Perjuangan partai adalah melalui penguasaan struktur kekuasaan. Dengan demikian, partai sesungguhnya adalah berorientasi pada kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan, memperluas kekuasaan dan mengelola kekuasaan.

Diakses pada tanggal 24 februari 2016 pada pukul 13:05 WIB.

¹⁷ Sigit Pamungkas, *PARTAI POLITIK Teori dan Praktik di Indonesia*, Institut for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

d. Instrumen untuk meraih kekuasaan adalah melalui pemilu, bukan yang lainnya. Pada titik ini, partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan atau gerakan sparatis dan kudeta.

Terdapat beberapa ciri pembeda antara partai politik dengan organisasi selainnya. Secara umum Partai politik perhatian utamanya adalah pada pemilu, mereka sepenuh waktu berkomitmen pada aktivitas politik, memobilisasi massa dalam jumlah yang sangat besar. Memiliki waktu hidup yang sangat lama serta mereka menyediakan diri sebagai simbol politik.¹⁸

Dari beberapa definisi diatas bisa di artikan bahwa partai politik itu berbeda dengan ormas, yang mana perhatian utamanya parpol pada pemilu sedangkan ormas pada kelancaran program kerja yang mereka buat.

Menurut Caton dalam negara demokrasi dari berbagai fungsi partai politik yang ada sebenarnya terdapat 4 (empat) fungsi sentral partai politik. Fungsi dari partai politik adalah:

- a. Artikulasi kepentingan, yaitu mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang konsisten.
- b. Fungsi agregasi kepentingan memungut tuntutan masyarakat dan membungkusnya.

¹⁸ Hershey dalam Sigit Pamungkas, *PARTAI POLITIK Teori dan Praktik di Indonesia*, Institut for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

- c. Rekrutmen, yaitu menyeleksi dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif.
- d. Mengawasi dan mengontrol pemerintah.

4. Relasi Antara Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Relasi adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang berbeda. Dalam konteks ini, relasi diartikan sebagai hubungan antara satu individu dengan individu lainnya atau satu organisasi dengan organisasi lainnya yang berbeda.¹⁹

Istilah relasi (*linkage*) adalah serangkaian hubungan atau koneksi yang biasanya berkonotasi dengan istilah “interaksi” antar elemen yang berhubungan atau berkorelasi satu sama lain. Proses hubungan ini diindikasikan dengan pola yang beragam seperti saling ketergantungan (*interdependency*), penetrasi, intervensi, integrasi, dan sebagainya. Bila merujuk lebih jauh, banyak studi politik yang menggunakan istilah “linkage” untuk menggambarkan inter-koneksi warga dengan proses pembuatan keputusan dalam proses kebijakan publik; hubungan antar warga negara yang aktif secara politik dengan para politisinya atau pejabat publiknya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, istilah *linkage* juga banyak digunakan oleh studi politik yang berusaha menggambarkan peran aktor inter-mediari, terutama partai politik dalam mengembangkan *linkage*.²⁰

¹⁹ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 165

²⁰ Kay Lawson & David Clark, *Political Parties and Linkage: A Comparative Perspective*, Oxford: Oxford Universities, 2009, hlm. 129

Meskipun studi-studi *political linkage* tidak memiliki pemahaman tunggal dan jelas tentang apa sebenarnya yang mereka maksud dengan *linkage*, Robert Teigrob berusaha memberikan kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan *linkage* yaitu, suatu bentuk hubungan/ikatan/koneksi yang terjadi diantara warga negara secara individual, organisasi sosial, dan sistem politik. Hubungan/ikatan/koneksi tersebut, utamanya bersifat organisasional sebagaimana baik secara formal maupun informal diantara organisasiorganisasi sosial dan organisasi politik. Istilah "*linkage*" juga mengacu pada perasaan keterikatan individu yang bersifat lebih subyektif dengan organisasi-organisasi yang ada di sistem politik.²¹

Relasi politik dapat dilihat dari struktur serta visi dan misi Organisasi Masyarakat, dan juga asal usul terbentuknya Organisasi Masyarakat. Jika sebuah Organisasi Masyarakat didirikan oleh partai politik tertentu, maka ia akan menjadi bagian dari partai politik tersebutsehingga kerja-kerja Organisasi Masyarakat tersebut bertujuan untuk kepentingan partai politiknya. Dengan demikian, segala kebutuhan operasional Organisasi Masyarakat ini akan didukung oleh partai politik tersebut.

²¹ Robert Teigrob, *The Politics of Linkage: Power, Interdependence, and Ideas in Canada-US Relations*, Canadian Public Policy Volume 37 Number 1, Maret 2011

Sementara Kay Lawson, seperti dikutip oleh Alistair Clark, menegaskan bahwa terdapat beberapa bentuk atau tipologi political linkages yang ada dalam praktik relasi dengan politik, yaitu:²²

- a. *Participatory linkage*, di mana posisi Organisasi Masyarakat ataupun partai politik berperan sebagai arena atau agen yang bekerja secara bersama-sama untuk kepentingan publik di bawah kerangka independensi dan profesionalitasnya masing-masing.
- b. *Electoral linkage* bentuk relasi dimana para pemimpin partai politik mengontrol seluruh elemen dalam proses elektoral dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat dalam urusan publik.
- c. *Policy responsive linkage*, yaitu sebagai agen yang memastikan pemerintah responsif terhadap pemilihnya atau mewakili suara rakyat dalam urusan publik.
- d. *Representative linkage*, yaitu ketika pola hubungan yang ada berhasil memastikan keterwakilan baik dalam konteks electoral maupun kebijakan secara lebih luas.
- e. *Clientelistic linkage*, di mana partai politik bertindak sebagai saluran berbagai keuntungan dengan imbal balik loyalitas dan dukungan suara.

²² Dr. Alistair Clark, *Political Parties in the UK*, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2012

- f. *Directive linkage*, yang terbangun jika pengurus partai politik selalu berusaha memastikan dan mengontrol perilaku warga dengan cara koersif dan dominatif.
- g. *Organisational linkage*, di mana terjadi pertukaran antara elit partai politik dengan organisasi yang memobilisasi atau memastikan dukungan organisasi mereka terhadap partai politik.
- h. *Directive linkage* melalui sosialisasi, pendidikan, dan kaderisasi politik.

Sementara itu, Sutoro Eko membagi relasi Organisasi Masyarakat dengan partai politik menjadi tujuh bentuk, yaitu:²³

- a. Relasi Partisipatif, Relasi partisipatif dianggap sebagai relasi yang paling ideal, dimana partai politik merupakan representasi dari berbagai organisasi masyarakat, dan masyarakat dilibatkan dalam proses politik yang diusung oleh partai politik.
- b. Relasi Klientalistik, Relasi Klientalistik merupakan relasi yang terbentuk untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- c. Relasi Programatik, Relasi Programatik adalah relasi dalam bentuk hubungan erat antara Organisasi masyarakat dengan partai diikat dengan kesamaan dan komitmen ideologi maupun program..

²³ Sutoro Eko dalam Chairul Fahmi dkk, Relasi Politik OMS dengan Partai Politik: sebuah dinamika & tantangan gerakan sipil di aceh, Banda Aceh: The Aceh Institute & The Asia Foundation, 2014. hlm. 22.

- d. Relasi Personal, Relasi personal adalah relasi antara tokoh partai politik tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap personal dari organisasi sipil, yang kemudian menyebabkan dukungan organisasi sipil kepada organisasi politik.
- e. Relasi Pasar, Relasi ini merupakan relasi jangka pendek antara OMS dengan partai politik yang terbangun karena kecocokan isu yang diusung oleh partai politik dengan isu yang diperjuangkan oleh OMS.
- f. Relasi Parokhial Bentuk ini hampir sama dengan relasi personal.
- g. Relasi Oposisional sama dengan relasi yang diperkenalkan oleh Karl Marx, yaitu relasi negatif.

Sutoro kemudian merumuskan kategori/tipe relasi Organisasi Masyarakat dengan partai politik yang lebih spesifik, yaitu:

- a. Integrasi/korporatis

Integrasi atau korporasi yaitu Organisasi Masyarakat menjadi partisan, menjadi alat/basis/mesin partai politik untuk dimanfaatkan atau dibentuk oleh partai politik. Organisasi Masyarakat digunakan untuk kaderisasi maupun untuk menjalankan program/ideologi partai politik, termasuk program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan politik. Di Amerika Serikat misalnya, (National Democratic Institute (NDI) merupakan LSM sayap Partai Demokrat, sementara International Republican Institute (IRI)

bekerja untuk Partai Republik. Di Jerman, Konrad Adenauer (KAS) adalah sayap Partai Christian, Friedrich Ebert Stiftung (FES) adalah sayap Partai Sosialis, dan Friedrich Nauman FNS sayap Partai Liberal.

b. Kolaborasi/aliansi/partisipatoris

Relasi kolaborasi atau aliansi alias partisipatory adalah relasi yang dibangun oleh Organisasi Masyarakat bersifat nonpartisan dan independen. Bentuk relasi ini menjadikan posisi organisasi sipil sebagai instrumen gerakan sosial untuk melakukan berbagai advokasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

c. Klientelistik

Klientalistik disini dimaksudkan posisi antara Organisasi Masyarakat dan partai politik terjalin dengan erat dan dekat. Relasi ini juga terbentuk karena hubungan personal maupun parokhial dan terjadi pertukaran ekonomi-politik yang saling menguntungkan, dimana Organisasi Masyarakat memperoleh keuntungan secara nilai ekonomis, sementara partai politik meraih keuntungan dukungan secara politik. Contohnya, Organisasi Masyarakat menggunakan dana aspirasi untuk bekerja bagi kepentingan partai politik yang memberikan dana aspirasi tersebut.

d. Oposisi/Konfrontasi.

Relasi oposisi atau disebut juga relasi konfrontasi adalah relasi antara Organisasi Masyarakat dengan partai politik yang saling bertentangan satu sama lain. Organisasi Masyarakat mengambil sikap non-partisan dan independen secara organisasi serta cenderung menunjukkan perlawanan terhadap partai politik. Sikap ini didasarkan kepada keyakinan bahwa partai politik dianggap cenderung korup, tidak amanah, melakukan kejahatan terhadap rakyat, dsb.

Sebagai organisasi masyarakat, tentulah posisi organisasi kemasyarakatan berada di antara masyarakat dengan pemerintah ataupun penguasa. Sungguhpun demikian organisasi tersebut bukanlah menempati posisi terdekat kepada pemerintah seperti yang tergambar di dalam prosedur hubungan kekuasaan di dalam Sistem Politik Indonesia. Di antara pemerintah dan organisasi tersebut berada posisi organisasi politik atau partai. Gambaran posisi tersebut tidaklah menunjukkan daya pengaruh suatu organisasi terhadap pemerintah. Gambaran tersebut bersifat netral dalam artian urutan letak di antara pemerintah dengan masyarakat sebagai dua titik yang dapat di pakai sebagai pangkal memandang.²⁴

Sepanjang hidupnya organisasi kemasyarakatan memberikan kontribusinya kepada politik sebagai salah-satu bidang atau bentuk

²⁴ Mochtar Mas' oed dan Colin McAndrews, ed., *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1978, hal. 84-85

kehidupan masyarakat. Tentu saja kontribusi tersebut bervariasi di antara berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada. Namun secara umum tidaklah jujur untuk mengenyampingkan peranan seperti itu.²⁵

Peranan Organisasi kemasyarakatan terhadap kehidupan politik di Indonesia dapat dibedakan atas sumbangannya kepada masyarakat,²⁶ yaitu:

- a. Organisasi kemasyarakatan membuka dirinya sebagai lembaga untuk melaksanakan sosialisasi politik.
- b. Organisasi ini berperan sebagai penghimpun para individu pemangku kepentingan yang tersebar di seantero masyarakat untuk dipersatukan.
- c. Organisasi kemasyarakatan mengangkat kepentingan-kepentingan yang dihimpun tersebut kedalam suatu formulasi kebijaksanaan.
- d. Melayani masyarakat sebagai sarana komunikasi politik.

Dalam pengabdianya kepada organisasi atau partai politik dan pemerintah sebagai unsur kehidupan politik, organisasi kemasyarakatan menghimpun anggota masyarakat yang dijadikan sebagai kekuatan pendukung.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

Konsep dalam penelitian digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep merupakan istilah dan

²⁵ SiSTEM POLITIK MASYARAKAT *Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik* hal 58, *Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi* Drs. ARBI SANIT, CV. Rajawali. Jakarta. oktober 1985

²⁶ G.A. Almond dan J.S. Coleman, ed., *The Politics of the Developing Areas*, Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1960, hal. 26-33

definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Melalui konsep diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan Umum adalah aktivitas yang dilakukan oleh negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi untuk memilih siapa yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengatur dan membuat kebijakan yang dipilih langsung oleh rakyat.
- b. Organisasi Masyarakat adalah Organisasi yang dibentuk dan didirikan oleh masyarakat atas dasar kesamaan aspirasi serta tujuan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan yang sama.
- c. Partai Politik adalah suatu alat untuk memperoleh kekuasaan dalam tatanan pemerintahan negara demokrasi.
- d. Relasi Organisasi Masyarakat dan Partai politik adalah Hubungan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat dan Partai Politik untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atas dasar kepentingan bersama.

F. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variable. Dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksanaan untuk mengukur

satu variable.²⁷ Definisi Operasional mengenai Peran Pemuda Pancasila dalam pemenangan Salah Satu Calon pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Indramayu adalah :

1. Peran Organisasi Masyarakat dalam pemenangan pemilu.
 - a. Sosialisasi Politik.
 - b. Pemangku kepentingan yang tersebar.
 - c. Komunikasi politik.
2. Pola Relasi Organisasi Masyarakat dengan Partai Politik.
 - a. Clientaristic linkage.
 - b. Participatory linkage
 - c. Organisational linkage

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menemukan ,mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Berikut ini akan dikemukakan, jenis penelitian, sumber penelitian data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di

²⁷ Sofyan Efen dan Masri Singarimbun, *Metode penelitian survey*, LP3ES, Jakarta.1986

lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Sekretariat Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penulis juga melakukan observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Sumber data penelitian

Sumber Data Secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli). Data primer dalam penelitian ini berupa data/hasil wawancara yang akan penulis lakukan dengan ketua Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila dan serta Pengurus organisasi tersebut. Serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Sekretariat Pimpinan Cabang Pemuda

Pancasila Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, denah lokasi Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan sumber lain yang diperlukan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dalam melaksanakan teknik ini dilakukan dengan cara akan mewawancarai ketua Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila dan para pengurus Pemuda Pancasila

Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat serta Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Pelaksanaan wawancara dengan ketua Pemuda Pancasila dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam Peran Organisasi ini dalam pemenangan caleg partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Indramayu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini akan penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di Sekretariat Pemuda Pancasila Kabupaten Indramayu Jawa Barat dan berupa foto-foto yang akan penulis ambil ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Setelah editing selesai selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses analisis ini penulis akan menggunakan metode *deskriptif*.

Teknik analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian dan untuk menyimpulkan data-data di lapangan yang berhubungan dengan Peran Pemuda Pancasila Dalam Pemenangan Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Indramayu.